

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam 5 tahun terakhir ini Provinsi Sumatera Barat yang merupakan salah satu dari 34 Provinsi di Indonesia dengan luas hampir mencapai 42.252, 24 km persegi dan terdiri dari 19 Kabupaten Kota (BPS Propinsi Sumbar, 2019) telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup pesat terutama dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan fisik. Berbagai infrastruktur dasar seperti; jalan; jembatan; gedung; penyediaan air bersih dan sumber daya energi serta jaringan komunikasi (Hariyono, 2007) telah dibangun dan akan terus dikembangkan untuk menjadikan Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu Provinsi yang memiliki daya saing. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur adalah suatu cara untuk meningkatkan perkembangan ekonomi khususnya bagi negara-negara berkembang (Reini D. Wirahadikusumah, 2019). Ketersediaan semua infrastruktur ini adalah merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam mendukung aktifitas ekonomi masyarakat dan salah cara untuk meningkatkan perkembangan ekonomi suatu bangsa. (Reini D. Wirahadikusumah, 2019).

Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan pembangunan berbagai infrastruktur ini dapat dilihat dari jumlah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat selama tiga tahun terakhir yang hampir mencapai Rp. 1.439.501.259.162,- yang digunakan untuk pembangunan 66 ruas jalan dan 11

unit jembatan, 96 unit gedung-gedung pemerintah, 65 unit jaringan irigasi, 81 kegiatan pengendalian banjir, 8 buah embung dan infrastruktur lainnya 100 kegiatan (LPSE SUMBAR 2017,2018 dan 2019).

Besarnya alokasi dana yang diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur ini dan diperkirakan untuk beberapa tahun mendatang sesuai dengan visi dan misi pemerintah dapat dipastikan akan tetap mengalami pertumbuhan. Namun dalam pelaksanaannya pemerintah mensinyalir atau menduga besarnya alokasi dana yang dikeluarkan belum sebanding dengan hasil dan nilai (*value*) yang diharapkan. Dugaan pemerintah ini sesuai dengan laporan yang dilakukan oleh Lean Construction Institute, melalui penelitian yang dilakukan oleh Abduh (2005) yang menyatakan bahwa hampir 57% dari pelaksanaan konstruksi yang dikerjakan di Indonesia dilaksanakan kurang efektif dan baru 10% diantaranya memiliki atau memberikan nilai tambah (*Value*).

Walaupun belum tersedia kajian empiris yang menunjukkan ekonomi, efisiensi dan efektifitas pelaksanaannya yang relatif rendah di Provinsi Sumatera Barat. Namun dari laporan Lean Construction Institute diatas dan didukung pula penelitian yang dilakukan oleh Kaming, Olomolaiye, Holt & Harris (1997) terhadap dunia kontruksi di Indonesia, menemukan dari 137 yang diteliti menunjukkan 55% diantaranya mengalami keterlambatan dan pembengkakan biaya sebagai bentuk ketidakefisienenan dalam pelaksanaannya. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hal yang sama mungkin juga terjadi di Provinsi Sumatera Barat dan fenomena lain juga ditemukan beberapa infrastruktur

yang dibangun kondisinya ada yang mangkrak, tidak tepat guna dan sebagainya. (Reini D. Wirahadikusumah, 2019).

Menyadari hal tersebut dan untuk menghindari kemungkinan yang sama terjadi pada masa depan, pemerintah melalui Perpres 16 th 2018 telah menerbitkan dan menetapkan 7 prinsip dasar pengadaan dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia dan 2 diantaranya adalah ; efektif dan efisien. Namun sejak diterapkannya peraturan ini belum ada evaluasi yang dilakukan apakah pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan telah memenuhi ketiga prinsip yang dimaksud. Seperti telah memenuhi peran / fungsinya dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja (Harry Kurniadi, 2015) dan telah dilaksanakan sesuai dengan konsep ekonomis, efisiensi dan efektifitas serta tepat sasaran dan berdayaguna.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut diatas. Salah satu cara untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas adalah dengan melakukan evaluasi kinerja pembangunan infrastruktur berbasis konsep *Value for Money* (VfM) yaitu penilaian kinerja berdasarkan konsep efisiensi, efektifitas dan ekonomi.

1.2 Pertanyaan Penelitian

1. Apa saja faktor yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pembangunan infrastruktur di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan konsep *Value for Money* (VfM) ?

2. Faktor apa yang paling dominan untuk menilai kinerja pembangunan infrastruktur di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan konsep *Value for Money* (VfM) ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi factor-faktor yang dapat digunakan dalam menilai kinerja pembangunan infrastruktur di Provinsi Sumatera Barat dengan konsep *Value for Money* (VfM).
2. Untuk mengetahui faktor yang dominan dalam menilai kinerja pembangunan infrastruktur di Provinsi Sumatera Barat dengan konsep *Value for Money* (VfM).

1.4 Batasan Masalah Penelitian

Mengingat begitu luasnya kajian tentang pembangunan infrastruktur, dan agar pembahasan tetap konsisten kepada penelitian yang dilakukan, maka untuk menjawab tujuan penelitian ini terdapat beberapa batasan masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Pembahasan penelitian dilakukan dalam tahap / proses pengadaan sampai serah terima pekerjaan infratsruktur di Provinsi Sumatera Barat.
2. Kajian penelitian difokuskan kepada faktor kinerja berbasis *Value for Money* (VfM) pada pembangunan infrastruktur di Provinsi Sumatera Barat.
3. Batasan Penelitian yang akan dilakukan pada pembangunan infrtrastruktur di Provinsi Sumatera Barat dengan nilai diatas 2,5 Milyar dari tahun 2017 sampai dengan 2019.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak terkait, dan beberapa manfaat yang diharapkan yaitu sebagai berikut :

1. Bagi peneliti sendiri diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman terkait tentang Kinerja Berbasis *Value for Money* (VfM) pada pembangunan infrastruktur.
2. Bagi pihak akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan bisa dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait dengan faktor kinerja Berbasis *Value for Money* (VfM) dalam pembangunan infrastruktur.
3. Bagi pihak pemerintah Provinsi Sumatera Barat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai evaluasi dan pembenahan untuk lebih baik lagi terkait dengan sistem pembangunan infrastruktur di instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

1.6 Sistematika Penulisan Penelitian

Sistematika penulisan yang diterapkan terdiri dari beberapa bab dan sub bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini akan menjelaskan hal-hal yang menjadi dasar teoritis dalam pelaksanaan penelitian ini. Sumber-sumber pustaka yang digunakan dalam penelitian ini meliputi baik dari buku, jurnal atau sumber lainnya khususnya yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang pembentukan hirarki struktural, pembentukan keputusan perbandingan dan alur pikir penelitian serta langkah dan perhitungan.

BAB IV : Analisis dan Pembahasan

Bab ini berisikan tentang hasil analisis data yang diperoleh melalui jawaban responden dari pertanyaan-pertanyaan kuisisioner dan melakukan analisis data sesuai dengan metode dan indikator yang terdapat pada bab metodologi penelitian, mulai dari gambaran umum responden, analisis data dan pembahasan.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Memuat kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian dan memberikan saran terkait dengan hasil dan topik pembahasan penelitian.